BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Muaro Jambi maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Muaro Jambi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Pelaksanaan PPDB dilakukan melalui sistem online, dengan melalui empat jalur pendaftaran yaitu jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Pengimplementasian PPDB pada jalur zonasi di SMA Negeri 1 Muaro Jambi belum terlaksana secara optimal, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, karena masih terdapat beberapa kendala yang masih menghambat pengimplementasiannya. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman siswa dan orang tua pada pendaftaran jalur zonasi ini, serta adanya kendala teknis seperti gangguan pada website pendaftaran, dan jaringan internet. Penerapan PPDB berbasis zonasi ini membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain mempermudah akses pendidikan bagi siswa yang berdomisili dekat sekolah dan mengurangi beban biaya transportasi. Namun, terdapat pula dampak negatif seperti ketidakpuasan masyarakat akibat keterbatasan daya tampung, serta masalah teknis dalam pendaftaran online. Selain itu, sistem zonasi terkadang dinilai kurang mengakomodasi siswa berprestasi yang jaraknya jauh dari sekolah tujuan. Meskipun berbagai kendala ditemukan, pihak sekolah terus berupaya memperbaiki sistem dan meningkatkan sosialisasi agar implementasi PPDB berbasis zonasi ke depannya dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan adil, serta sesuai dengan prinsip penerimaan peserta didik baru yaitu objektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan non diskriminasi.

5.2 Implikasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memperkuat teori implementasi kebijakan publik yang mana pengimplementasiannya harus ada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, untuk melihat keberhasilan dari penerapan kebijakan tersebut. Penerapana kebijakan ini juga menekankan pentingnya faktor objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dalam konteks PPDB berbasis online, komunikasi yang efektif melalui sosialisasi kepada masyarakat berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini juga mengonfirmasi pandangan bahwa kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya untuk mencapai pemerataan akses pendidikan yang lebih baik.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan sekolah dalam meningkatkan implementasi PPDB. Sekolah perlu memperkuat sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman terkait mekanisme PPDB dan mengurangi kesalahpahaman yang dapat memicu ketidakpuasan orang tua. Selain itu, peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi sangat diperlukan untuk mengatasi kendala teknis, seperti kesalahan titik koordinat dan gangguan jaringan dalam sistem pendaftaran online. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi PPDB dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

5.3 Saran

1. Peneliti berharap penelitian ini dapat mendorong sekolah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan sosialisasi terkait mekanisme PPDB, dan peningkatan kapasitas sistem online, agar masyarakat lebih memahami kebijakan ini dan mengurangi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan ketidakpuasan.
2. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni ruang lingkup terbatas di SMA Negeri 1 Muaro Jambi, belum mengkaji transisi dari PPDB ke SPMB, serta jumlah informan yang sedikit dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas kebijakan. Meski begitu, penelitian ini unggul dalam menyajikan gambaran komprehensif tentang implementasi PPDB berbasis zonasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dilengkapi analisis dampak, kendala, dan solusi. Temuan diperkuat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dapat menjadi acuan awal bagi penelitian tentang efektivitas kebijakan SPMB.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan awal dalam mengkaji kebijakan SPMB. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas fokus, termasuk faktor infrastruktur digital, persepsi masyarakat, dan dampak sosial-ekonomi, serta melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang. Pendekatan perbandingan antara PPDB dan SPMB juga penting untuk menilai efektivitas dan keadilan kebijakan baru. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam dan bermanfaat bagi pengembangan sistem penerimaan peserta didik.